



STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN GERAKAN SEPARATIS PAPUA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA

(GOVERNMENT STRATEGIES IN MANAGING PAPUA SEPARATIST
MOVEMENT AND ITS IMPLICATIONS ON DEFENSE DIPLOMACY)

Mukhtadi

Dosen Tetap Prodi SPD FSP UNHAN (Universitas Pertahanan)

mukhtadi.harry@idu.ac.id

Abstract: This article discusses one of the government's efforts in handling the Papuan separatist movement. The Separatism Movement is a movement to gain sovereignty and separate from a territory or group of people from each other (or another country). In Papua, there is a group of people who want to be sovereign and break away from the Republic of Indonesia. A group of people called themselves Free Papua Organization (OPM). Papua de facto and de jure is one of the regions of Indonesia, so the Indonesian government prohibits anyone or any group that seeks to secede from the Republic of Indonesia (The Unitary State of The Republic of Indonesia). In Papua until now, there are still frequent conflicts related to political, economic, or socio-cultural issues. This research aims to find out how the government overcomes the separatist movement so that a group of people who call the OPM movement (Free Papua Organization) aware and return to the lap of the NKRI (Unitary State of the Republic of Indonesia)

Keywords: diplomasi pertahanan, separatist, Papua, conflict.

Abstrak : Artikel ini membahas tentang salah satu upaya pemerintah dalam penanganan gerakan separatis Papua dan implikasinya terhadap Diplomasi Pertahanan. Gerakan Separatisme adalah gerakan untuk memperoleh kedaulatan dan memisahkan dari suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Di Papua, ada sekelompok orang yang ingin berdaulat dan memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sekelompok orang tersebut menamakan dirinya



gerakan Operasi Papua Merdeka. (OPM). Papua secara de facto dan de jure adalah salah satu wilayah Indonesia, maka pemerintah Indonesia melarang siapapun atau kelompok manapun yang berusaha memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Di Papua hingga saat ini, masih sering terjadi konflik terkait persoalan politik, ekonomi ataupun sosial budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengatasi gerakan separatis tersebut, agar sekelompok orang yang menamakan dirinya gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka) sadar dan kembali ke pangkuan wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Kata kunci : separatis, papua, konflik.

PENDAHULUAN

Kebijakan dalam negeri secara langsung mempengaruhi persepsi bangsa-bangsa lain di dunia. Papua secara de facto dan de jure adalah resmi menjadi wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) namun hingga saat ini masih ada sekelompok orang yang terus mencoba untuk memperoleh kedaulatan dan memisahkan diri dari wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) Gerakan ini sudah ada sejak masa pendudukan Jepang di Papua pada 1942-1946. Yang menamakan dirinya gerakan Koreri dipimpin Angganitha Menafaur. Ia menjuluki dirinya 'Ratu Emas dari Judea' dan menahbiskan diri sebagai nabi perempuan titisan Manseren Manggoendi. Gerakan Koreri yang awalnya gerakan kebatinan bermetamorfosa menjadi gerakan kemerdekaan bersifat ethno nasionalis politis akibat militansi Stephanus Simopyaref, rekan seperjuangan Menafaur. Tekad Simopyaref untuk menyatukan segenap suku dan klan Melanesia ke dalam satu pandangan nasionalisme bangsa Papua.

Perlawanan gerakan Koreri pada tahun 1942, meskipun akhirnya bisa ditumpas oleh Jepang dengan dibunuhnya pengikut gerakan Koreri sekitar 500-600 orang dan Menafaur selaku pimpinan gerakan tersebut ditahan lalu dibawa ke Manokwari. Simopyaref membangkitkan semangat idealisme kemerdekaan bangsa Papua, melalui misi menyelamatkan Menafaur. Dengan Ia menginstruksikan penyusunan tentara,



armada dan masyarakat, dengan mengibarkan bendera Belanda yang dibalikkan, ditambah dengan bintang laut putih (sampari) di latar biru dan di klaim sebagai bendera Koreri. Simopyaref mengklaim bendera itu telah diwahyukan Manseren Mangundi kepada Menafaur. Di pertengahan 1942, Simopyaref ditangkap tentara Jepang setelah sebelumnya terjadi serangkaian dialog dan kontak senjata antara kubu Simopyaref dan tentara Jepang. Ia lalu dibawa ke Manokwari. Bersama Menafaur, di sana mereka berdua diancam hukuman mati oleh tentara pendudukan Jepang. Namun gelora kemerdekaan bangsa Papua terlanjur dikumandangkan Simopyaref dalam wadah gerakan Koreri Menafaur.

Perjalanan bangsa Papua dalam menentukan nasib sendiri memasuki babak baru saat persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945, kepastian status Papua sebagai bagian wilayah Indonesia menjadi topik perdebatan alot di antara para pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam pandangan Moh. Yamin, Soekarno dan Kahar Muzakar, strategi geopolitik Indonesia mengharuskan Papua terintegrasi dengan Indonesia, sekalipun secara etnografis bangsa Papua lain dengan bangsa Indonesia. Bahkan Soekarno menyatakan, jika ditilik dari sisi historis, dalam Nagarakertagama-manuskrip kronik jaman Majapahit yang ditulis Mpu Prapanca, Papua ternyata masuk dalam wilayah kerajaan Majapahit. Lagipula. Namun Moh. Hatta berbeda. Menurut beliau, pandangan Yamin, Soekarno dan kawan-kawan itu merupakan pandangan imperialis. Dengan melihat pendekatan etnografis, bangsa Papua itu bangsa Melanesia, bukan bangsa Polinesia yang mendiami sebagian besar wilayah Indonesia. Persoalan apakah Papua dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia atau tidak, menurut Hatta, bisa diserahkan kepada keputusan bangsa Papua sendiri.

Pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, namun Papua secara administratif masih di bawah naungan kerajaan Belanda. Merasa sudah terlalu lama mengeruk kekayaan alam di tanah Papua, Belanda merasa perlu memberikan kebebasan bagi bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Misi moril dekolonisasi pemerintah Belanda bertujuan untuk menyiapkan kemerdekaan Papua sebagai negara sendiri di bawah naungan Belanda. Merespon niat Belanda itu, kaum elit



terdidik Papua merencanakan penentuan nasib sendiri melalui pembentukan Nieuw Guinea Raad yang diresmikan pada April 1951. Untuk merealisasikan misi dekolonialisasi Belanda, beberapa pentolan Nieuw Guinea Raad yaitu Nicolaas Jouwe dan kawan-kawan membentuk komite nasional dalam rangka mempersiapkan alat-alat dan simbol kelengkapan negara. Negara bangsa Papua yang dipersiapkan itu dinamai Papua Barat (West Papua). Pada 1 Desember 1961, Bintang Kejora, bendera nasional negara Papua Barat dikibarkan sejajar dengan bendera Belanda, dan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dinyanyikan dihadapan mahkota kerajaan Belanda.

Peristiwa itu menyebar cepat hingga ke pusat pemerintahan Indonesia. Dari alun-alun Yogyakarta, lewat pidato Tri Komando Rakyat pada 19 Desember 1961, presiden Soekarno mengobarkan semangat pengembalian Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi dari skenario pembentukan negara boneka Belanda. Pada awal 1962, pasukan Indonesia mulai melancarkan operasi pembebasan Irian Barat. Di tengah memanasnya konflik Belanda Indonesia, pada Maret 1962, Amerika Serikat mengajukan usulan mengenai penyelesaian persoalan Papua Barat kepada PBB. Usulan itu ditindaklanjuti dengan New York Agreement pada 15 Agustus 1962. Kesepakatan antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia itu berisi: (1) Belanda menyerahkan tanggung jawab administratif pemerintahan Papua Barat kepada PBB melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA); (2) Terhitung 1 Mei 1962, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia; (3) Pada akhir 1969, dibawah pengawasan PBB, dilakukan Act of Free Choice bagi rakyat Papua untuk dapat menentukan sendiri nasib atau kemerdekaannya sendiri.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu salah satu metode penelitian yang sifatnya deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dari suatu data yang ada. Penelitian kualitatif sering disebut dengan ethometodologi yang berarti penelitian berdasar kejadian yang terjadi di lapangan. Proses dan makna yang dikaji lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Metode kualitatif dapat memberikan



gambaran penelitian terhadap cara pemerintah mengatasi gerakan separatisme Papua dari landasan teori yang ada. Landasan teori ini juga bermanfaat dalam memberikan pembahasan hasil penelitian. Sehingga penulis dapat menyimpulkan sendiri dengan memberikan pembahasan mengenai cara pemerintah mengatasi aksi gerakan separatisme yang terjadi di Papua.

HASIL

Aktifitas Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah untuk melapaskan diri dari Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) berimplikasi terhadap diplomasi pertahanan. Perkembangan dari pergerakan dan perjuangan OPM terjadi di berbagai tempat di Papua yang berlangsung sejak 1967 hingga saat ini beberapa negara memanfaatkan untuk mengrogoti Indonesia. Gerakan separatisme yang terjadi di Papua menarik untuk dicermati karena beberapa alasan, antara lain: (1) Papua saat ini adalah satu-satunya Provinsi di Indonesia yang proses integrasinya melalui mekanisme Internasional dengan penentuan jajak pendapat (PEPERA); (2) gerakan separatisme di Papua menunjukkan watak gabungan antara pemahaman tradisional suku-suku dengan simbolisasi pemujaan terhadap koreri atau bintang kejora di satu sisi, dan di sisi lain dipimpin oleh orang-orang yang dididik ideologi kebangsaan secara modern untuk melakukan lobi-lobi politik yang bermartabat; (3) gerakan separatisme di Papua ini bertahan lama dan selalu mampu memperbaharui kepemimpinannya.

R Z. Leirissa dalam buku "Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya" yang terbit pada 1992 menilai gerakan separatis yang dilakukan OPM-dan serangkaian peristiwa terkait yang terjadi di Papua-adalah hasil dari didikan Belanda yang sewaktu-waktu akan meledak. Dengan cara pandang seperti ini Leirissa terkesan menyalahkan pihak asing atas kegagalan pemerintah Indonesia mengelola konflik Papua selama Papua terintegrasi dengan Indonesia.

Brian May yang meneliti di Papua pada sekitar akhir 60-an dan awal 70-an menunjukkan kompleksitas sekaligus karakteristik yang khas dari gerakan rakyat



Melanesia. Ia tak dapat disebut semata-mata sebagai suatu gerakan politik atau gerakan perlawanan gerilya. Ia mengidap sesuatu yang secara psikologis jauh lebih kompleks daripada apa yang bisa didefinisikan sebagai suatu gerakan politik. OPM adalah suatu gerakan rakyat yang bersifat keagamaan yang isinya dijiwai oleh suatu ideologi keselamatan, pembebasan, dan pemakmuran melalui proses-proses yang bersifat gaib yang model-modelnya terdapat dalam mitos-mitos. OPM lahir setelah serangkaian pertarungan kekuasaan yang melibatkan Pemerintah RI, Amerika Serikat, UNTEA, Pemerintah Belanda, dan sejumlah elit terdidik Papua yang berlangsung sejak 1962 hingga 1969. PEPERA 1969 menandai “kemenangan” usaha integrasi Papua Barat oleh Pemerintah RI. Sebagian elit Papua yang Pro Belanda hijrah ke Belanda. OPM juga ditumbuhkan dan dibesarkan oleh seluruh proses tersebut di atas yang di dalamnya tersimpan pengalaman ketidakadilan oleh rekayasa berlebihan dari militer Indonesia. Sejak itu sebagian elit Papua pimpinan OPM membangun perlawanan dan mencoba melibatkan rakyat dalam usahanya “merebut kembali” kemerdekaan Papua Barat yang sempat mereka proklamasikan pada 1 Desember 1961.

PEMBAHASAN

Masih terjadinya kasus kekerasan menjadi bukti bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menangani konflik tersebut dinilai masih kurang tepat. Berdasarkan data Amnesty International Indonesia, terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dalam rentang waktu Januari 2010 hingga Februari 2018. Pelaku kekerasan didominasi aparat kepolisian dengan 34 kasus, lalu anggota TNI 23 kasus. Sementara 11 kasus lain dilakukan bersama-sama oleh anggota Polri dan TNI. Sedangkan, satu kasus dilakukan oleh satuan polisi pamong praja. Akibat tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, sebanyak 85 warga Papua meninggal dunia. Terima kasih telah membaca Kompas.com. Di sisi lain, aksi kekerasan juga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dalam sebulan terakhir turut menewaskan aparat keamanan.



Penanganan kasus kekerasan yang terjadi di Papua memerlukan pendekatan kolaboratif dan holistik agar persoalan yang terjadi dapat segera selesai. Halkis, M (2020) menjelaskan penanganan masalah Papua tidak cukup dengan penegakan hukum, karena persoalan dengan Papua adalah masalah politik. Strategi diplomasi pertahanan merupakan komplement dalam dalam menangani masalah Papua.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menuturkan, pendekatan dialog dapat dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dialami masyarakat Papua, seperti diskriminasi dan ketidakadilan. "Dialog damai sebagai strategi penyelesaian siklus kekerasan dan membuka jalan untuk isu-isu lain, ketidakadilan, diskriminasi, hak ulayat dan sebagainya," kata Beka dalam diskusi virtual bertajuk Menanti Perdamaian di Papua: Urgensi Penghentian Kekerasan, Kamis (6/5/2021). Selain dialog ada sejumlah langkah yang juga dapat dilakukan pemerintah, antara lain: Penegakan hukum Beka meminta agar pemerintah harus memastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan.

"Penyelesaian konflik di Papua diperlukan pendekatan secara kolaboratif dan holistik. Persoalan Papua yang complicated dan multidimensi ini perlu dipahami dalam spektrum yang lebih luas," kata Karyono dalam diskusi bertajuk Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik, Kamis (6/5/2021). Karyono menilai, persoalan Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan solusi tunggal.

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi; dalam diskusi virtual bertajuk Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik, Kamis (6/5/2021). Politikus Partai Golkar itu menegaskan, tindakan rasialisme terhadap masyarakat Papua harus dihilangkan. Dia meminta, pemerintah bertindak tegas semua pihak yang masih melakukan praktik rasialisme. Selain itu, Bobby juga meminta pemerintah mengintensifkan dialog yang setara dan partisipatif antara pusat dan daerah. Ia pun meminta, dialog itu terpusat dilakukan dengan pemangku kepentingan di tujuh wilayah adat di Papua.

Jika dilihat secara keseluruhan, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, tanah Papua menjadi semakin maju. Tentunya tetap dalam kerangka NKRI. Presiden



Joko Widodo (Jokowi) membuat agenda prioritas pembangunan infrastruktur nasional di Papua. Jokowi seolah menganakemaskan Papua yang selama ini dianggap seperti “anak tiri” bagi NKRI, dengan membangun infrastruktur yang nantinya dapat dimanfaatkan rakyat Papua. Salah satu infrastruktur yang tengah gencar dibangun adalah jalan.

Jokowi mengatakan pembangunan jalan di Papua mendorong lancarnya distribusi barang yang turut menghemat ongkos logistik dan ujungnya menurunkan harga barang. Jokowi ingin harga barang-barang di Papua bisa semakin murah seiring dengan makin lancarnya arus logistik barang. Infrastruktur jalan yang tersedia semakin baik akhirnya akan menjadi sumber pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia terutama di Papua. Dengan adanya agenda prioritas tersebut diharapkan mereduksi gerakan separatis di Papua dan ke depannya kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah RI semakin baik.

KESIMPULAN

Kelompok Sparatisme yang menamakan dirinya OPM (Organisasi Papua Merdeka) sudah ada sejak pendudukan tentara Jepang di Papua pada 1942-1946. Hingga saat ini masih terus berusaha untuk menuntut kedaulatan dan memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Separatisme di Papua untuk menegaskan kedaulatan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Upaya-upaya dilakukan pemerintah menjadi perhatian dunia Internasional, untuk itu pertimbangan diplomasi pertahanan dalam mengelola konflik di daerah harus memperhatikan aspek-aspek diplomasi pertahanan.

Implikasi menangani masalah tersebut Presiden Joko Widodo membuat agenda prioritas pembangunan infrastruktur nasional di Papua. Jokowi seolah menganakemaskan Papua yang selama ini dianggap seperti “anak tiri” bagi NKRI, dengan membangun infrastruktur yang nantinya dapat dimanfaatkan rakyat Papua. Salah satu infrastruktur yang tengah gencar dibangun adalah jalan. Dengan adanya agenda prioritas tersebut diharapkan mereduksi gerakan separatis di Papua dan ke



depannya kepercayaan rakyat Papua dan masyarakat internasional terhadap pemerintah semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad "MEMAHAMI GERAKAN SEPARATISME DI PAPUA" Cetakan 1, 2018
Diterbitkan oleh: The Phinisi Press Yogyakarta Jalan Nitipuran No. 313
Yogyakarta
- Al Araf et.al (eds.). (2011). Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua. Jakarta: Imparsial.
- Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani. (2011). Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ekspedisi Tanah Papua: Laporan Jurnalsitik Kompas: Terasing di Pulau Sendiri. (2009). Jakarta: Kompas.
- Emilia, Ranny. (2013). Praktek Diplomasi. Jakarta: Baduosemedia.
- Howard, Michael and Peter Paret (ed.). (1989). On War, New Jersey: Princeton University Press.
- Halkis, M. (2020). *The Implementation of Penta Helix Counterinsurgency (COIN) Strategic Model in Reconstructing Special Autonomy for Papua*. *Society*, 8(1), 234-248. DOI : 10.33019/society.v8i1.182
- I Ngurah Suryawan (ed.). (2011). Tanah Papua di Garis Batas: Perspektif, Refleksi & Tantangan. Malang: Setara Press.
- "Kampanye Intemasional Gerakan Separatis Papua: Bagaimana Indonesia Menghadapinya" (2014). Jakarta: Kemlu.
- Meteray, Bernarda. (2012). Nasionalisme Ganda Orang Papua. Jakarta: Kompas.



Medina, Anisa. (2018) Tingkah Laku OPM Meningkatkan Kebencian Publik Terhadap Separatis. <https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/12/06/107154/tingkah-laku-opm-meningkatkan-kebencian-publik-terhadap-separatis>

"Papua: The Danger of Shutting Down Dialogue," Background Report, ICG, 23 March 2006.

"Peta Kekerasan di Indonesia (Mei-Agustus 2012)," Kajian Perdamaian dan Kebijakan, Edisi 02/November 2012, The Habibie Center.

Sinaga, Rosmaida. (2013). Masa Kuasa Belanda di Papua (1898-1962). Depok: Komunitas Bambu, 2013.

Wospakrik, D. (2018) Gerakan Separatisme di Papua mengurai konflik dan solusi penyelesaian Papua – Jakarta

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Papua_Merdeka (Diakses. 6 Juni 2021)

<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/09545191/sederet-langkah-yang-bisa-diambil-pemerintah-untuk-akhiri-konflik-di-papua?page=all>.(Diakses 6 Juni 2021)